

## Peran Komunikasi Digital dalam Mendukung Integrasi Ekonomi Digital ASEAN: Mediasi Legitimasi Budaya Digital

Liliana Nindariati<sup>1</sup>, Syakina Ahdanisa<sup>2</sup>

Universitas Riau<sup>1</sup>, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia<sup>2</sup>

[liliana.nindariati4356@grad.unri.ac.id](mailto:liliana.nindariati4356@grad.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [syakinaahdanisa926@gmail.com](mailto:syakinaahdanisa926@gmail.com)<sup>2</sup>

Artikel diserahkan pada: 10-11-2025; direvisi pada: 20-11-2025; diterima pada:

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *komunikasi digital* dalam membentuk legitimasi budaya digital serta kontribusinya terhadap *integrasi ekonomi digital ASEAN*. Pendekatan yang digunakan adalah *Systematic Literature Review (SLR)* dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Sebanyak 22 artikel ilmiah yang relevan diterbitkan pada periode 2020–2025 dikaji untuk mengidentifikasi pola konseptual dan hubungan antarvariabel utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa *komunikasi digital* berpengaruh positif terhadap legitimasi budaya digital dan legitimasi budaya digital tersebut berperan signifikan dalam memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan integrasi ekonomi digital kawasan. Temuan penelitian juga membuktikan bahwa legitimasi budaya digital berfungsi sebagai variabel mediasi antara komunikasi digital dan integrasi ekonomi digital ASEAN. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kerangka *network society* dengan menekankan dimensi sosial-budaya dalam pembangunan ekonomi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya diplomasi budaya digital yang inklusif serta literasi digital lintas budaya untuk memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan integrasi ekonomi digital ASEAN.

**Kata Kunci:** komunikasi digital, legitimasi budaya digital, integrasi ekonomi digital, ASEAN, diplomasi budaya digital.

### PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi kekuatan dominan yang membentuk tatanan sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. (Castells, 2010) melalui konsep *network society* menjelaskan bahwa kekuasaan dan

identitas di era digital tidak lagi bertumpu pada sumber daya fisik, melainkan pada kemampuan aktor dalam mengelola arus informasi dan membentuk wacana publik. Pandangan ini diperkuat oleh (Westlund et al., 2025) yang menegaskan bahwa

komunikasi digital berfungsi sebagai ruang produksi representasi, di mana makna, legitimasi, dan identitas kolektif dikonstruksi secara dinamis. Pada konteks ASEAN, *ASEAN Digital Masterplan 2025* (ASEAN Secretariat, 2025) menempatkan transformasi digital sebagai pilar utama integrasi kawasan. (Chen & Fanoulis, 2025) menambahkan bahwa diplomasi digital kini memainkan peran strategis dalam membentuk persepsi, citra, dan kohesi antarnegara anggota, menegaskan bahwa komunikasi digital bukan sebatas alat pertukaran pesan, melainkan arena pembentukan legitimasi dan kepercayaan regional.

Perkembangan ekonomi digital ASEAN memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Laporan *e-Cconomy Southeast Asia* (Temasek & Bain & Company, 2024) mencatat nilai ekonomi digital kawasan mencapai sekitar US\$100 miliar pada 2023 dan diproyeksikan melonjak menjadi US\$330 miliar pada 2030. Namun, sebagaimana dikemukakan (Isono & Prilliadi, 2023), kesenjangan infrastruktur dan literasi digital masih

menjadi hambatan utama dalam proses integrasi regional.

Pertumbuhan tersebut terutama dipicu oleh pesatnya sektor *e-commerce*, layanan keuangan digital, dan ekonomi kreatif yang berkembang di Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Di balik laju pertumbuhan yang tinggi, masih terdapat kesenjangan digital yang nyata antarnegara ASEAN (World Bank, 2025). Negara seperti Singapura dan Malaysia telah memiliki ekosistem digital yang matang, sementara Myanmar, Laos, dan Kamboja masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dan literasi teknologi.

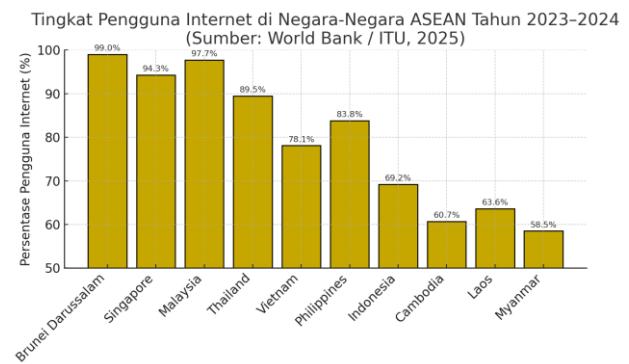


Diagram 1 Tingkat Pengguna Internet di ASEAN

Data *Individuals Using the Internet* dari World Bank (2023–2024) memperlihatkan perbedaan mencolok antara Brunei Darussalam (99%),

Malaysia (98%), dan Singapura (94%) dibanding Myanmar (59%), Kamboja (61%), dan Laos (64%). Indonesia (77%), Filipina (84%), Vietnam (84%), dan Thailand (91%) berada pada posisi menengah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa integrasi digital ASEAN tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada legitimasi sosial yang menentukan sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi secara setara dalam ruang digital kawasan.

(Fischer & Jarren, 2024) melalui konsep *platformization* menjelaskan bahwa struktur ruang publik digital kini dikendalikan oleh algoritma yang menentukan siapa dan wacana apa yang mendapatkan visibilitas. Pada konteks ASEAN, fenomena ini mengubah pola komunikasi antarnegara dan memunculkan hierarki baru dalam diplomasi digital. (McConnell & Manby, 2024) menambahkan bahwa diplomasi di era digital tidak lagi terbatas pada kanal formal, tetapi juga berlangsung melalui jaringan komunikasi lintas platform yang melibatkan negara, lembaga

kawasan, komunitas budaya, dan publik. Hal ini tampak dalam program *ASEAN Cultural Heritage Digital Archive* (ACHDA) yang dikaji oleh (Kwiecien et al., 2025), di mana warisan budaya digital tidak hanya menjadi arsip simbolik, melainkan instrumen pembentukan legitimasi budaya regional.

(Prisgunanto et al., 2025) menemukan bahwa komunikasi publik digital yang dilakukan ASEAN melalui situs web dan media sosial berperan penting dalam membentuk citra kelembagaan kawasan. Sedangkan penelitian (Wu & Ho, 2025a) serta (Sefrina, 2023b) menyoroti bahwa kajian tentang integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN masih didominasi oleh isu kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan partisipasi pasar tanpa mengaitkannya dengan legitimasi sosial-budaya. Sementara itu, studi (Tang, 2025) dan (Grincheva, 2024) mengenai *digital cultural diplomacy* lebih menekankan promosi identitas dan simbol budaya di ruang digital, tanpa menghubungkan dimensi tersebut dengan proses integrasi

ekonomi. Sebagaimana juga pandangan dari (Suranto et al., 2025), literatur tentang komunikasi digital, diplomasi budaya, dan integrasi ekonomi ASEAN masih berkembang secara terpisah.

Konsep legitimasi budaya digital berdasarkan (Suchman, 1995), legitimasi budaya merupakan penerimaan kolektif terhadap nilai atau tindakan sosial yang dianggap layak dan sesuai dengan norma bersama. Dalam konteks digital, legitimasi budaya digital (Kwiecien et al., 2025) dapat dipahami sebagai penerimaan publik terhadap identitas kawasan yang dimediasi oleh representasi digital. Legitimasi ini berperan sebagai jembatan antara komunikasi digital dan integrasi ekonomi, karena integrasi hanya dapat berjalan efektif apabila masyarakat kawasan memiliki rasa kebersamaan simbolik dan kepercayaan lintas batas. Dengan kata lain, komunikasi digital yang kuat berpotensi membentuk legitimasi budaya digital yang kemudian memperkuat dukungan terhadap integrasi ekonomi digital ASEAN

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada empat kerangka utama. Pertama, *network society* (Castells, 2010) yang menekankan pentingnya arus informasi dalam membangun identitas sosial. Kedua, *platformization*

(Fischer & Jarren, 2024) yang menunjukkan bagaimana algoritma mengatur akses dan visibilitas dalam ruang publik digital. Ketiga, *digital cultural diplomacy* (Grincheva, 2024; Tang, 2025a) yang menjelaskan bagaimana negara-negara ASEAN menggunakan media digital untuk memperkuat citra budaya bersama. Keempat, konsep legitimasi budaya digital (Kwiecien et al., 2025; Suchman, 1995) yang menyoroti bagaimana legitimasi sosial dibentuk melalui representasi dan partisipasi digital. Integrasi dari keempat teori ini membantu menjelaskan mekanisme hubungan antara komunikasi digital, legitimasi budaya digital, dan integrasi ekonomi digital dalam konteks ASEAN.

Penelitian ini menjadi penting karena menjawab dua pertanyaan mendasar: pertama, mengapa komunikasi digital berperan kunci

dalam menjembatani kesenjangan antara pembangunan ekonomi dan kohesi budaya di ASEAN; kedua, bagaimana legitimasi budaya digital berfungsi sebagai mekanisme mediasi yang menghubungkan komunikasi digital dengan integrasi ekonomi kawasan. Kajian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena berupaya menggabungkan dimensi komunikasi, budaya, dan ekonomi ke dalam satu kerangka konseptual yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (Xiao & Watson, 2019) dengan mengikuti pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Pendekatan ini dipilih agar analisis dapat dilakukan secara sistematis terhadap literatur ilmiah terkini, termasuk publikasi di jurnal bereputasi tinggi dan dokumen kebijakan resmi ASEAN (ASEAN Secretariat, 2025; Community Relations Division, 2024). Menelaah karya-karya akademik periode 2020–2025, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola konseptual dan hubungan antar-temuan mengenai komunikasi digital, legitimasi budaya, dan integrasi ekonomi digital kawasan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat pemahaman tentang peran komunikasi digital sebagai jembatan antara dimensi budaya dan ekonomi dalam integrasi ASEAN. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan kawasan dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif, berbasis legitimasi budaya digital, serta mendukung pembangunan ekonomi digital ASEAN yang berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik *komunikasi digital*, legitimasi budaya digital, dan *integrasi ekonomi digital* ASEAN. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pola konseptual dan hubungan antarteori yang berkembang dalam

kurun waktu 2020–2025 (Xiao & Watson, 2019). Economic Community Council (AECC) dalam rentang waktu tahun 2020-2025.

Pelaksanaan SLR mengikuti pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) sebagaimana dikembangkan oleh (Page et al., 2021).

Proses ini terdiri atas empat tahapan utama, yaitu:

- 4) Mengulas salah satu atau lebih aspek

1. Identifikasi, penelusuran literatur menggunakan kombinasi kata kunci seperti “*digital communication*”, “*digital cultural legitimacy*”, “*ASEAN digital economy*”, dan “*digital diplomacy*”.
- 4) Mengulas salah satu atau lebih aspek

komunikasi digital, diplomasi budaya digital, atau integrasi ekonomi digital. Artikel berupa opini, laporan media, atau publikasi tanpa metode ilmiah dikecualikan dari analisis. Proses identifikasi awal menghasilkan 72

2. Penyaringan, seleksi awal berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan konteks penelitian.
- 4) Mengulas salah satu atau lebih aspek

melewati tahap penyaringan dan penilaian kelayakan, jumlah tersebut menyusut menjadi 22 artikel utama yang memenuhi kriteria analisis tematik. Jumlah tersebut telah

3. Kelayakan, evaluasi isi penuh artikel untuk memastikan relevansi dengan tujuan penelitian.
- 4) Mengulas salah satu atau lebih aspek

menemukan pola hubungan konseptual. Sumber literatur diambil dari basis data Scopus, ScienceDirect, Taylor & Francis Online, serta dokumen resmi ASEAN Secretariat dan ASEAN Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik sebagaimana dikemukakan Braun dan (Braun & Clarke, 2008). Tahapan

analisis meliputi: (1) *open coding* untuk mengidentifikasi konsep kunci; (2) *axial coding* untuk mengelompokkan hubungan antar konsep; dan (3) *selective coding* untuk membangun tema utama. Melalui proses ini, ditemukan tiga tema besar yang saling berhubungan, yaitu:

- 1) Komunikasi digital sebagai ruang produksi makna dan representasi identitas kawasan;
- 2) Diplomasi budaya digital sebagai sarana pembentukan legitimasi sosial; dan
- 3) Legitimasi budaya digital sebagai dasar penerimaan publik terhadap integrasi ekonomi digital ASEAN.

Sebagai bentuk transparansi akademik, hasil seleksi literatur disajikan dalam Tabel 1 yang memuat 22 artikel terpilih beserta penulis, tahun publikasi, sumber jurnal, serta fokus utama penelitian. Penyajian tabel ini dimaksudkan untuk menunjukkan keterlacakkan proses seleksi artikel dan mendukung validitas analisis yang dilakukan.

Tabel 1 Ringkasan Hasil dari 22 Studi yang Dianalisis

Tema Dominan	Jumlah Studi	Arah Kontribusi
<b>Komunikasi Digital &amp; Representasi Sosial</b>	6 studi ((Castells, 2010), (Westlund et al., 2025), (Irwanto et al., 2025), (Putra, 2024), (Hill, 2024), (Fischer & Jarren, 2024)) 4 studi ((Tang, 2025a), (Grincheva, 2024), (Khayitov et al., 2020), (Chen & Fanoulis, 2025))	Menguatkan H1: komunikasi digital berpengaruh terhadap legitimasi budaya digital.
<b>Diplomasi Budaya Digital</b>	6 studi ((Kwiecien et al., 2025), (Wu & Ho, 2025b), (Sefrina, 2023b), (Zhang et al., 2025), (Mishra & Valencia, 2023), (Suchman, 1995))	Menguatkan H2: diplomasi budaya digital membentuk legitimasi sosial kawasan.
<b>Legitimasi Budaya Digital &amp; Integrasi Ekonomi</b>	6 studi ((Kwiecien et al., 2025), (Wu & Ho, 2025b), (Sefrina, 2023b), (Zhang et al., 2025), (Mishra & Valencia, 2023), (Suchman, 1995))	Menguatkan H3–H4: legitimasi budaya digital menjadi mediator menuju integrasi ekonomi digital ASEAN.
<b>Kebijakan &amp; Infrastruktur ASEAN</b>	3 dokumen (ASEAN Secretariat 2024–2025, AECC 2024)	Menyediakan konteks kebijakan dan kesiapan

Tema Dominan	Jumlah Studi	Arah Kontribusi struktural kawasan.
<b>Kesenjangan &amp; Tantangan Digital</b>	3 studi ((Isono & Prilladi, 2023), (Elnathan & Mahendra Wiswayana, 2025), (Fischer & Jarren, 2024))	Menunjukkan hambatan partisipasi dan kebutuhan kebijakan inklusif dalam komunikasi digital.

Pendekatan SLR dengan panduan PRISMA memastikan bahwa kesimpulan penelitian bersumber dari bukti ilmiah yang sistematis, mutakhir, dan relevan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pemahaman mengenai peran komunikasi digital dalam membentuk legitimasi budaya digital dan kontribusinya terhadap integrasi ekonomi digital ASEAN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses *Systematic Literature Review* terhadap 22 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola hubungan

antarvariabel utama, yaitu komunikasi digital, legitimasi budaya digital, dan integrasi ekonomi digital ASEAN. Berdasarkan hasil sintesis literatur, ditemukan tiga tema besar yang menjelaskan bagaimana komunikasi digital berperan dalam membentuk legitimasi budaya digital dan mendukung integrasi ekonomi kawasan.

### 1. Komunikasi Digital sebagai Ruang Produksi Representasi ASEAN

Temuan pertama mendukung yang menyatakan bahwa komunikasi digital berpengaruh positif terhadap legitimasi budaya digital di kawasan ASEAN. Berbagai penelitian (Castells, 2010; Chen & Fanoulis, 2025; Westlund et al., 2025) menunjukkan bahwa komunikasi digital menjadi instrumen strategis dalam membangun representasi identitas kolektif ASEAN di ranah publik global.

Melalui ASEAN Digital Masterplan Portal, negara-negara anggota menggunakan komunikasi digital untuk menampilkan nilai-nilai budaya dan visi regional yang selaras (ASEAN Secretariat, 2025). Contohnya,

kampanye digital *ASEAN Youth Creative Network* di Indonesia dan *Smart Nation* di Singapura memperlihatkan bagaimana komunikasi digital membentuk narasi positif tentang ASEAN yang inklusif dan progresif.

Secara teoretis, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai arena produksi makna yang memperkuat legitimasi budaya digital. Semakin aktif komunikasi digital dilakukan secara kolaboratif, semakin kuat legitimasi sosial dan citra kolektif kawasan ASEAN di ruang digital global.

## 2. Diplomasi Budaya Digital dan Pembentukan Legitimasi Sosial

Temuan ini berkaitan dengan diplomasi budaya digital sebagai mekanisme pembentukan legitimasi sosial dan kohesi antarnegara anggota. (Tang, 2025a) menjelaskan bahwa diplomasi budaya digital memperluas praktik diplomasi tradisional melalui produksi konten budaya lintas batas seperti festival digital, pameran seni virtual, dan kampanye media sosial bersama. Program ASEAN Cultural

Heritage Digital Archive (Kwiecien et al., 2025) menjadi contoh konkret diplomasi budaya digital yang berhasil memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap warisan budaya kawasan.

(Grincheva, 2024) menambahkan bahwa diplomasi budaya digital kini bersifat jaringan (*networked diplomacy*), di mana aktor non negara seperti lembaga budaya, universitas, dan komunitas kreatif turut berperan membentuk legitimasi kawasan. Melalui proyek-proyek digital seperti ASEAN Creative Economy Forum, muncul bentuk legitimasi sosial baru yang berbasis partisipasi publik.

Namun, sebagaimana diingatkan (Elnathan & Mahendra Wiswayana, 2025), legitimasi ini belum merata. Negara-negara dengan sumber daya komunikasi yang terbatas masih menghadapi kesulitan dalam menampilkan budaya mereka di platform digital ASEAN. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan komunikasi yang lebih inklusif agar seluruh anggota memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam

produksi simbol dan narasi budaya digital kawasan.

### **3. Legitimasi Budaya Digital sebagai Fondasi Integrasi Ekonomi Digital**

Tema ketiga menyoroti bahwa legitimasi budaya digital merupakan faktor kunci dalam keberhasilan integrasi ekonomi digital ASEAN. (Suchman, 1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi bahwa suatu tindakan atau kebijakan sesuai dengan sistem nilai bersama yang berlaku. Dalam konteks ini, legitimasi budaya digital menjadi jembatan antara komunikasi digital dan penerimaan publik terhadap kebijakan ekonomi digital regional.

(Wu & Ho, 2025a) serta (Sefrina, 2023a) menemukan bahwa negara-negara ASEAN dengan tingkat partisipasi digital dan legitimasi sosial yang tinggi seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand cenderung memiliki kesiapan ekonomi digital yang lebih matang. Sebaliknya, negara-negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepercayaan publik terhadap transaksi digital dan

keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi digital tidak hanya bergantung pada faktor teknologi dan regulasi, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap sistem digital serta mengakui legitimasi sosialnya sebagai bagian dari tatanan ekonomi baru di kawasan.

Maka dari itu, legitimasi budaya digital bukan hanya konsep simbolik, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keberhasilan ekonomi digital kawasan. Ketika masyarakat ASEAN merasa bahwa identitas digital bersama mencerminkan nilai dan aspirasi mereka, dukungan terhadap kebijakan integrasi ekonomi digital akan meningkat. Artinya, keberhasilan integrasi ekonomi digital ASEAN bergantung pada kemampuan kawasan membangun legitimasi budaya digital yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

**Tabel 2. Ringkasan Hasil Temuan Berdasarkan Analisis SLR**

Tema	Fokus Pembahasan	Temuan Utama	Sumber Relevan
Komunikasi digital dan	Eksplorasi bagaimana komunikasi	Komunikasi digital berperan	(Castells, 2010; Chen &

Tema	Fokus Pembahasan	Temuan Utama	Sumber Relevan	
representasi ASEAN	digital membentuk citra dan identitas kawasan	sebagai ruang representasi identitas kolektif ASEAN; terjadi kesenjangan partisipasi antarnegara	Fanoulis, 2025; Isono & Prilliadi, 2023)	untuk memahami bagaimana arus informasi membentuk relasi kekuasaan dan identitas. Ketika arus ini dikelola melalui platform digital, muncul ruang publik baru yang diatur oleh logika algoritmik dan partisipasi sosial (Fischer & Jarren, 2024).
Diplomasi budaya digital	Peran platform digital dalam memperkuat kohesi sosial dan legitimasi kawasan	Diplomasi budaya digital memperluas kerja sama lintas negara dan memperkuat rasa memiliki terhadap identitas ASEAN	(Grincheva, 2024; Kwiecien et al., 2025; Tang, 2025b)	Diplomasi budaya digital (Grincheva, 2024; Tang, 2025) menunjukkan bahwa legitimasi sosial dapat dibangun melalui partisipasi publik lintas batas negara. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan antarmasyarakat ASEAN, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan yang menjadi dasar legitimasi ekonomi digital. Dengan demikian, legitimasi budaya digital (Kwiecien et al., 2025; Suchman, 1995) berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan komunikasi digital dengan dukungan publik terhadap kebijakan ekonomi kawasan.
Legitimasi budaya digital dan integrasi ekonomi	Hubungan antara legitimasi budaya digital dan dukungan terhadap ekonomi digital kawasan	Legitimasi budaya digital menjadi variabel mediasi antara komunikasi digital dan integrasi ekonomi digital ASEAN	(Sefrina, 2023a; Suchman, 1995; Wu & Ho, 2025a)	Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan integrasi ekonomi digital ASEAN tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan budaya yang melekat dalam proses komunikasi digital. <i>Network society</i> (Castells, 2010) menyediakan kerangka

Model 1 Legitimasi Budaya Digital dalam Transformasi Digital ASEAN berbasis (Castells, 2010)



Model *Network Society ASEAN* menggambarkan proses terbentuknya legitimasi budaya digital melalui alur yang berlapis. Tahap awal dimulai dari node budaya digital, yakni aktor-aktor yang memproduksi identitas digital kawasan, sesuai konsep masyarakat jaringan (Castells, 2010). Node ini kemudian terhubung melalui flow komunikasi digital regional, yaitu arus pertukaran narasi budaya yang muncul dari kampanye dan konten lintas negara (Chen & Fanoulis, 2025). Arus tersebut berkembang menjadi *networked interaction practices*, berupa interaksi jejaring non-hierarkis yang difasilitasi oleh struktur platform digital dan praktik diplomasi budaya

digital (Fischer & Jarren, 2024). Interaksi berulang inilah yang membangun *cultural legitimacy formation*, ketika publik menerima identitas digital ASEAN sebagai nilai bersama, sejalan dengan konsep legitimasi sosial (Suchman, 1995). Pada tahap akhir, legitimasi budaya digital memperkuat *inclusive digital transformation*, yaitu dukungan publik yang lebih stabil terhadap integrasi ekonomi digital kawasan (Sefrina, 2023a).

(Castells, 2010) menegaskan bahwa legitimasi dan identitas di era digital dibentuk melalui hubungan antara node dan arus informasi, sehingga intensitas komunikasi digital menjadi kunci terciptanya identitas kolektif dan dukungan publik dalam masyarakat jaringan.

Studi-studi terdahulu yang dianalisis dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ASEAN belum sepenuhnya mencapai integrasi digital yang inklusif. Namun, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan legitimasi budaya digital dapat menjadi strategi alternatif untuk

memperkuat solidaritas regional dan mendukung transformasi ekonomi digital yang berkeadilan.

1. Penguatan literasi digital lintas budaya, agar legitimasi sosial terhadap kebijakan digital meningkat.

2. Diplomasi budaya digital yang lebih aktif, melalui kolaborasi antarnegara dan sektor kreatif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menelaah hubungan antara komunikasi digital, legitimasi budaya digital, dan integrasi ekonomi digital ASEAN menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* terhadap 22 artikel ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh hipotesis ( $H1-H4$ ) terdukung secara konseptual. *Komunikasi digital* terbukti memperkuat legitimasi budaya digital, yang pada gilirannya mendorong penerimaan dan keberhasilan integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang pentingnya dimensi sosial-budaya dalam ekonomi digital. *Digital cultural legitimacy* terbukti menjadi variabel penghubung antara komunikasi dan ekonomi digital, memperkuat teori *network society* (Castells, 2010) dan memperkaya literatur diplomasi digital di konteks ASEAN. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan:

Kebijakan komunikasi digital yang inklusif, untuk mengurangi kesenjangan antarnegara anggota.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bersifat konseptual berbasis literatur. Kajian empiris lanjutan diperlukan untuk mengukur pengaruh nyata antarvariabel dan memperdalam pemahaman tentang legitimasi budaya digital di kawasan lain.

Demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi ekonomi digital ASEAN sangat bergantung pada kekuatan legitimasi budaya digital yang inklusif dan representatif terhadap nilai-nilai masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat. (2025). *ASEAN Digital Masterplan 2025*.  
Braun, V., & Clarke, V. (2008). Using thematic analysis in

- psychology, Qualitative Research in Psychology. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2).
- Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society, Second Edition, With a New Preface. In *The Rise of the Network Society, Second Edition, With a New Preface*. <https://doi.org/10.1002/9781444319514>
- Chen, X., & Fanoulis, E. (2025). EU digital public diplomacy in Southeast Asia during the COVID19 pandemic. *European Politics and Society*, 26(3), 564–586. <https://doi.org/10.1080/23745118.2024.2389976>
- Community Relations Division. (2024). *ANNUAL REPORT 2024 ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience*. [www.asean.org](http://www.asean.org)
- Elnathan, A., & Mahendra Wiswayana, W. (2025). *ASEAN's Limitation of Regional Digital Integration: How Digital Sovereignty Overlaps Regional Organization Effectiveness*. 4(10). <http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>
- Fischer, R., & Jarren, O. (2024). The platformization of the public sphere and its challenge to democracy. *Philosophy and Social Criticism*, 50(1), 200–215. <https://doi.org/10.1177/01914537231203535>
- Grincheva, N. (2024). The past and future of cultural diplomacy. *International Journal of Cultural Policy*, 30(2), 172–191. <https://doi.org/10.1080/10286632.2023.2183949>
- Hill, A. (2024). Streaming platform imaginaries: audiences and Southeast Asian streaming. *Continuum*, 38(5), 662–675. <https://doi.org/10.1080/10304312.2024.2411969>
- Irwanto, I., Bahfiarti, T., Unde, A. A., & Sonni, A. F. (2025). Social Network Analysis of Information Flow and Opinion Formation on Indonesian Social Media: A Case Study of Youth Violence. *Adolescents*, 5(2). <https://doi.org/10.3390/adolescents5020018>
- Isono, I., & Prilliadi, H. (2023). *ASEAN's Digital Integration Evolution of Framework Documents*.
- Khayitov, S., Muxamedaminov, A., Boboev, A., Yusubov, J., & Atadjanova, D. (2020). Features of digital systems in Asean countries. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5).
- Kwiecien, K., Chansanam, W., & Tuamsuk, K. (2025). Digital Cultural Heritage in Southeast Asia: Knowledge Structures and Resources in GLAM Institutions. *Informatics*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/informatics12030096>

- McConnell, F., & Manby, A. (2024). Digital Diplomacy and Non-Governmental and Transnational Organizations. In *The Oxford Handbook of Digital Diplomacy*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192859198.013.21>
- Mishra, N., & Valencia, A. M. P. (2023). Digital services and digital trade in the Asia pacific: an alternative model for digital integration? *Asia Pacific Law Review*, 31(2), 489–513. <https://doi.org/10.1080/10192557.2023.2216058>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. In *BMJ* (Vol. 372). <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Prisgunanto, I., Pranawukir, I., & Rusmawan, T. (2025). Digital Public Communication in Image Building: A Survey of ASEAN Official Website. *Studies in Media and Communication*, 13(3), 170–183. <https://doi.org/10.11114/smc.v13i3.7565>
- Putra, B. A. (2024). Digital activism in Southeast Asia: the #MilkTeaAlliance and prospects for social resistance. *Frontiers in Sociology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1478630>
- Sefrina, M. (2023a). *An Inclusive Digital Economy in the ASEAN Region*.
- Sefrina, M. (2023b). *Understanding the ASEAN Digital Economy Framework Agreement: A Means to Support ASEAN Integration*.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3). <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Suranto, B., Kovač, N., Haryono, K., Abdul Rahman, S. F., Mohd Shukri, A. F., Suder, M., Kusa, R., & Žugić, D. (2025). State of digitalization in the Southeast Asia region – bibliometric analysis. *Quality and Quantity*. <https://doi.org/10.1007/s11135-025-02296-3>
- Tang, R. (2025a). The Practical Approach of Cultural Communication between China-ASEAN in the Era of Digital Intelligence. *JOURNAL OF ADVANCES IN LINGUISTICS*, 16, 1–6. <https://doi.org/10.24297/jal.v16i.9716>

- Tang, R. (2025b). The Practical Approach of Cultural Communication between China-ASEAN in the Era of Digital Intelligence. *JOURNAL OF ADVANCES IN LINGUISTICS*, 16, 1–6. <https://doi.org/10.24297/jal.v16i.9716>
- Temasek, & Bain & Company. (2024). *e-Cconomy SEA 2024*.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. In *British Journal of Management* (Vol. 14, Issue 3). <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Westlund, O., Boyles, J. L., Guo, L., Saldaña, M., Salaverría, R., Thomson, T. J., & Wu, S. (2025). Digital Journalism (Studies): An Agenda for the Future. In *Digital Journalism* (Vol. 13, Issue 2, pp. 179–194). Routledge. <https://doi.org/10.1080/21670811.2025.2474530>
- World Bank. (2025). *Individuals using the Internet (% of population)*.
- Wu, S., & Ho, Y. J. (2025a). Digital Consumption Index for ASEAN-6: A proxy developed with China as benchmark. *Journal of Policy Modeling*, 47(3), 551–568. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmo.2024.08.001>
- Wu, S., & Ho, Y. J. (2025b). Digital Consumption Index for ASEAN-6: A proxy developed with China as benchmark. *Journal of Policy Modeling*, 47(3), 551–568. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmo.2024.08.001>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. In *Journal of Planning Education and Research* (Vol. 39, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Zhang, L., Pham, T. D., Li, R., & Do, T. T. (2025). Enhancing the Sustainable Development of the ASEAN's Digital Trade: The Impact Mechanism of Innovation Capability. *Sustainability (Switzerland)*, 17(4). <https://doi.org/10.3390/su17041766>